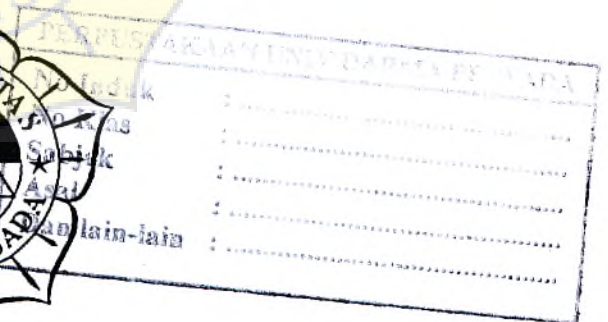


MASA DEPAN HONGKONG PASCA PENGEMBALIAN DALAM SATU NEGARA DUA SISTEM

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra



Oleh :
DEASY TRIANA
NIM : 92112013
NIRM : 923123200650081



JURUSAN SASTRA CINA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA
2000

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Sastra Program Strata Satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Sastra pada Universitas Darma Persada .

Meskipun dalam proses penulisan skripsi ini penulis menemui banyak kesulitan karena terbatasnya bahan – bahan untuk penulisan skripsi ini, maka berkat bantuan dan bimbingan para dosen, orang tua, tunangan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. W.D. Sukisman, selaku Rektor Universitas Darma Persada
2. Ibu Dra. Inny C. Haryono. M.A, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
3. Ibu Dra. Rebecca Dahlan, selaku Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Cina Universitas Darma Persada.
4. Bapak Priyanto Wibowo, S.S, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membantu memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran- saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
5. Ibu C. Dewi Hartati, S.S, selaku Pembaca Skripsi penulis.
6. Ibu Dra. Purwani Purawiardi, selaku Panitera dalam sidang skripsi penulis
7. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan perkuliahan selama penulis menuntut

ilmu di Universitas Darma Persada.

8. Para Staf Pegawai Sekretariat Sastra yang membantu penulis dalam proses perkuliahan.
9. Orang Tua Penulis, yang selalu mendukung dalam do'a dan memberikan dorongan serta semangat untuk menyelesaikan Skripsi.
10. **Suami** Penulis , yang senantiasa selalu sabar mendampingi dan membantu penulis setiap saat, mencarikan bahan – bahan skripsi dan selalu memberikan dorongan serta semangat lebih untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
11. Kakak – kakak dan saudara – saudara penulis yang juga membantu proses penulisan skripsi ini.
12. Rekan – rekan Sastra Cina S1, Guntari, Feriyanti, Pietferly, Ali, Mbak Aster, Roro, Vivi, Emi dan seluruh teman – teman angkatan 1994 dan 1995 yang selalu membantu dan mendukung penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi.

Walaupun demikian penulis mohon maaf apabila penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam pembuatannya.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan almamater Universitas Darma Persada

Jakarta, Juli 2000

Penulis

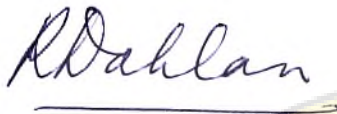
DEASY TRIANA

Skripsi Sarjana yang berjudul :

**MASA DEPAN HONGKONG PASCA PENGEMBALIAN
DALAM
SATU NEGARA DUA SISTIM**


Telah diuji dan diterima pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2000 di hadapan Panitia Ujian
Skripsi Sarjana Fakultas Sastra.

Ketua



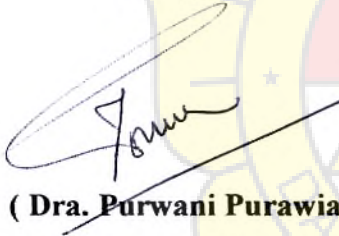
(Dra. Rebecca Dahlan)

Pembimbing



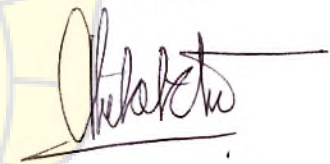
(Priyanto Wibowo, S.S)

Panitera



(Dra. Purwani Purawiardi)

Pembaca

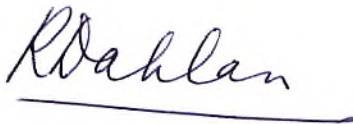


(C. Dewi Hartati, S.S)

disahkan oleh

Ketua Jurusan Program

Studi Cina



(Dra. Rebecca Dahlan)

Dekan Fakultas Sastra



(Dra. Inny C. Haryono, M.A)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	3
1.3 Tujuan Permasalahan	3
1.4 Kerangka Teori	4
1.5 Perumusan Hipotesis	5
1.6 Metode Penulisan	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II. LATAR BELAKANG PENYERAHAN KEDAULATAN HONGKONG KE RRC	8
2.1 Pra Penyerahan Kedaulatan Hongkong Ke Wilayah RRC	8
2.2 Pasca Penyerahan Kedaulatan Hongkong Ke Wilayah RRC	19
BAB III. SATU NEGARA DUA SISTEM DALAM PEMERINTAHAN HONGKONG	26
3.1 Pelaksanaan Dalam Bidang Politik	26
3.2 Pelaksanaan Dalam Bidang Ekonomi	35
BAB IV. MASA DEPAN HONGKONG	48
4.1 Masa Depan Politik Hongkong	49
4.2 Masa Depan Ekonomi Hongkong	58
BAB V. KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hongkong merupakan wilayah koloni Inggris yang terletak di pantai tenggara Republik Rakyat Cina, sekitar 145 Km dari Kanton, ibukota propinsi Guangdong. Teritorial Hongkong terdiri dari pulau Hongkong seluas 78 Km², semenanjung Kowloon seluas 13 Km², wilayah baru / *New Territories* seluas 975 km², serta berbagai pulau sekitarnya dari semenanjung Kowloon sampai perbatasan Cina, yang luas keseluruhannya 1.066 km².¹ Hongkong yang terletak di pantai tenggara Republik Rakyat Cina itu memiliki luas 1.044,6/km² dengan kepadatan penduduk 5.457/km² serta memiliki lebih dari 230 pulau lainnya di selatan sungai Mutiara.²

Hongkong juga merupakan wilayah strategis dalam perdagangan di Asia dan merupakan salah satu negara industri terpenting dalam bidang industri tekstil. Pariwisata di wilayah Hongkong pun juga merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting, karena Hongkong merupakan wilayah yang terkenal dengan pelabuhan bebas dan pelabuhan transito yang letaknya sangat strategis di pantai Cina Selatan. Oleh sebab itu banyak bangsa asing yang ingin singgah untuk melakukan bisnis perdagangan di Hongkong tersebut. Begitu juga dengan bangsa Inggris yang singgah di Hongkong untuk berdagang dan sekaligus menjajah Hongkong dengan taktik perdagangannya.³

Karena wilayah pelabuhan yang strategis inilah yang dijadikan lalu lintas perdagangan bangsa-bangsa asing, terutama bangsa Inggris. Inggris datang ke Cina untuk membeli teh dan kain sutera. Namun dari Cina sendiri tidak mau membeli sesuatu dari Inggris.

Opium adalah barang yang sudah lama dinikmati rakyat Cina jauh sebelum kedatangan Inggris. Karena itu, orang barat memilih menjual opium, meski tidak sepenuhnya legal. Opium itu antara lain didatangkan dari India.⁴

Saat pemerintah Cina berusaha menghentikan perdagangan opium, pecalah Perang Candu. Akibat perang itu, Dinasti Ching dipaksa menandatangani Perjanjian Nanking tanggal 29 Agustus 1842. Inggris memperoleh pulau Hongkong. Berdasarkan Perjanjian Beijing I tanggal 24 Oktober 1860. Inggris memperoleh pulau Kowloon. Pada tahun 1898 yaitu sesuai dengan Perjanjian Beijing II, New Territories yang semula merupakan propinsi Guangdong, disewakan kepada Inggris selama 99 tahun mulai tanggal 9 Juni 1898.⁵

Beberapa puluh tahun berjalan, tidak lama Hongkong akan mengakhiri masa kolonialisme di pemerintahan Inggris. Tepat pada tanggal 1 Juli 1997 Hongkong secara resmi dikembalikan kepada Cina setelah 155 tahun, sejak tahun 1842 melalui Perjanjian Nanjing, menjadi koloni Inggris.

Cina yang merupakan negara komunis dapat merebut kembali Hongkong ke kedaulatan Cina, dimana Hongkong merupakan negara kapitalis warisan Inggris yang juga merupakan pusat perdagangan, bisnis, dan keuangan dunia. Sehingga kesalahan atau gangguan pada jaringan-jaringan Hongkong ini, dengan sendirinya juga akan mengganggu seluruh jaringan ekonomi dunia.⁶

Dengan masuknya Hongkong ke dalam kedaulatan Cina, berbagai anggapan timbul dari berbagai kalangan yaitu :

1. apakah Hongkong akan mampu melaksanakan otonominya,
2. atau Cina akan membiarkan Hongkong mempunyai otonomi besar atau sebaliknya Cina akan melakukan manuver atau memotong otonomi Hongkong.
3. dan atau aspek eksternal atau internal pengembalian Hongkong kepada Cina.⁷

Maka dengan kembalinya Hongkong ke tangan kedaulatan Cina berarti dimulainya seluruh sistem pemerintah diantara kedua belah pihak baik Hongkong maupun Cina itu sendiri.

1.2. Pokok Permasalahan

Berawal dari latar belakang peristiwa Hongkong tersebut, dimana Hongkong dijadikan alat oleh pemerintah Inggris dan pemerintah Cina maka dengan adanya pengembalian Hongkong ke wilayah Cina, yang menjadi pokok permasalahannya adalah, " Bagaimana sistem negara Hongkong itu sendiri setelah pengembalian dan masa depan Hongkong itu sendiri setelah pengembalian".

1.3. Tujuan Permasalahan

Tanggal 30 Juni 1997, Inggris menyerahkan kekuasaan administrasi Hongkong kepada Cina.

Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan apa yang terjadi dengan Hongkong setelah berada di bawah kekuasaan Cina dan masa depan Hongkong itu sendiri nantinya serta pelaksanaannya dalam bidang ekonomi dan

politik. Dan menjelaskan sistem dalam negara Hongkong setelah berada di bawah kekuasaan Cina.

1.4. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan, dibutuhkan teori-teori untuk membantu menganalisa permasalahan tersebut. Mengingat permasalahan yang diajukan berkaitan dengan sistem negara yang akan berlaku di Hongkong dan masa depannya, maka relevan jika permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori kepentingan nasional.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton unsur-unsur yang tercakup dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.⁸

Menurut William D. Coplin, determinan-determinan yang turut menentukan perumusan politik luar negeri adalah perilaku pembuat keputusan, politik domestik, faktor ekonomi dan militer, dan situasi internasional yang meliputi lokasi geografis, kekuatan militer dan ekonomi negara-negara tetangga, eksistensi pemerintah yang agresif maupun pasif, perjanjian-perjanjian persahabatan dan adanya masalah yang dianggap sebagai masalah bersama.⁹

Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dan politik luar negeri, maka suatu negara memerlukan seperangkat sarana untuk melaksanakan. Salah satunya adalah melalui perdagangan sebagai sarana politik luar negeri.¹⁰

Berdasarkan kenyataan bahwa Hongkong kembali ke dalam wilayah kedaulatan RRC dan keadaan yang ingin diciptakan oleh RRC dan Hongkong pada tanggal 1 Juli 1997 maka relevan juga kalau dipakai konsep integrasi dengan

konsep security- community (komunitas keamanan), yaitu penciptaan “lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang cukup kuat dan cukup meluas sehingga bisa menjamin, untuk waktu yang lama, harapan diantara penduduknya akan adanya perubahan secara damai”.¹¹

1.5. Perumusan Hipotesis

Penelitian ini hanya akan melihat masa depan Hongkong dari aspek politik dan aspek ekonomi.

Dari segi politik :

Dengan kembalinya Hongkong diharapkan agar dapat membantu tercapainya sistem politik pemerintahan Hongkong yang sebenarnya.

Dari segi ekonomi :

RRC bermaksud menjadikan Hongkong sebagai pintu gerbang RRC dalam berhubungan dengan negara-negara barat dalam perdagangan luar negeri dan menjadikan Hongkong sebagai tulang punggung modernisasi ekonomi RRC.

1.6 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penggambaran atas suatu obyek atau kejadian yang akan diteliti secara sistematis, kemudian dengan data-data primer dan sekunder yang dipergunakan, dilakukan analisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data-data mengenai sistem pemerintahan di Hongkong dan masa depannya, penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersangkutan baik itu

merupakan buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan di surat kabar serta media cetak lainnya.

Sumber kepustakaan yang penulis gunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah tulisan-tulisan atau gagasan orang-orang yang hidup dan mengalami peristiwa tersebut, baik berupa buku, artikel, berita dan sebagainya dalam bahasa setempat. Sumber sekunder adalah bahan-bahan tulisan yang mengupas peristiwa gerakan tersebut yang ditulis oleh sarjana-sarjana yang melakukan penelitian tentang Cina.

Istilah – istilah Cina yang di pakai di skripsi ini menggunakan bahasa Han dengan ejaan resmi yang berlaku di Cina, yaitu Hanyu Pinyin (汉字拼音) dan huruf Cina atau yang di sebut dengan Hanzi (汉字).

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang :

I.1. Latar Belakang Masalah

I.2. Pokok Permasalahan

I.3. Tujuan Permasalahan

I.4. Kerangka Teori

I.5. Perumusan Hipotesis

I.6. Metode Penulisan

I.7. Sistematika Penulisan

CATATAN BAB I

1. _____, *Negara dan Bangsa 3* Grolier Internasional, Jakarta, 1989, hal : 45.
2. *Ensiklopedi Indonesia*, Geografi Asia, Jakarta, hal : 72.
3. *Ensiklopedi Indonesia*, Op.Cit, hal : 75 – 76.
4. Kompas 29 Juni 1997.
5. Ilham Gunawan, *Kamus Politik Internasional*, CV Restu Agung, Jakarta, 1983, hal : 62 – 63.
6. Kompas, 23 Maret 1997.
7. Edy Prasetyono, "1 Juli 1997 : Hongkong kembali ke Cina", *Analisa*, tahun XIII no : 6 .Desember 1997 hal : 621.
8. Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, CV Abardin Bandung, 1990 hal : 7.
9. William D Coplin, *Introduction to Internasional Politics*, Engelwood Cliffs : Prectice – Hall Inc, 1980, hal : 167 –168.
10. K.J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Analisa*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hal : 135.
11. Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal : 163.